



Judul : RUU DKJ Bakal Alot Nggak Harus Selesai Sebelum Reses DPR
Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

RUU DKJ Bakal Alot Nggak Harus Selesai Sebelum Reses DPR

BADAN Legislasi (Baleg) DPR mulai menggodok revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan. Revisi ini akan menempatkan Jakarta sebagai daerah khusus saja setelah adanya Ibu Kota Negara (IKN). Baleg pun diminta tidak buru-buru mengesahkan perubahan undang-undang ini dalam waktu dekat.

Anggota Baleg DPR Hermanto mengatakan, RUU Pemerintah Provinsi DKJ ini memang belakangan telah memicu polemik dan perdebatan yang sangat tajam di publik. Untuk itu, dia mendorong agar pandangan-pandangan publik ini perlu diperdalam.

"Ini menurut saya penting untuk menghindari perdebatan yang tajam tentang RUU ini," kata Hermanto dalam Rapat Baleg bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait RUU DKJ di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Karena itu, dia mendorong agar pembahasan RUU DKJ di Baleg ini tidak dilakukan tergesa-gesa apalagi terburu-buru. Baginya, pembahasan RUU ini tidak bisa hanya sekedar selesai. Namun lebih dari itu, harus tetap cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian, sehingga produk undang-undang yang dihasilkan tidak mengalami masalah di tengah-tengah masyarakat.

"Termasuk mengantisipasi respons masyarakat yang anti, misalnya, andaikata terjadi penolakan terhadap RUU ini, agar kita tidak diminta lagi mengulang pembahasannya," harapnya.

Hal senada dilontarkan anggota Baleg Taufik Basari. Pria yang akrab disapa Tobas ini menegaskan, usul penyelesaian RUU DKJ di masa sidang ini yang bakal berakhir pada 4 April 2024 masih bersifat tentatif. Hal ini masih tergantung dari berbagai dinamika yang terjadi di DPR.

"Tadi ada semangat ingin menyelesaikan ini dengan segera. Tadi Pak Ketua (Su-

Hermanto mengatakan, sangat besar kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan tajam dan pro kontra ketika membahas revisi ini. Untuk itu, perlu keseriusan dari semua pihak yang terlibat dalam pembahasan ini untuk mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada, sehingga lebih tertib. Termasuk kehadiran dari para anggota.

"Pendapat publik juga harus kita serap, sehingga tidak lagi ketika RUU ini diketok, ada yang hendak melakukan *judicial review*," katanya.

pratman Andi Agtas) sudah memberikan usulan untuk 4 April (dibawa ke Paripurna). Pada prinsipnya kita punya semangat yang sama tetapi ada catatan penting juga yang disampaikan oleh ketua, bahwa ini masih bersifat tentatif," kata Tobas.

Tobas mengingatkan, penyelesaian RUU ini tidak bisa dipaksakan.

"Supaya menjadi jelas juga, meski ada target tapi kita nanti lihat dinamika. Oleh karena itu, harus kita lihat proses dinamikanya," katanya. ■ KAL